

**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016  
(Studi Kualiatatif pada Pegawai Instansi X Berdasarkan  
Peraturan Bupati No. 1.A.1 Tahun 2015)**

---



**GEBY DHEA LUKITA**

---

**YAYASAN INDRA HUSADA INDRAMAYU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) INDRAMAYU  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
INDRAMAYU  
2018**

---

## **PENDAHULUAN**

**Menurut data WHO Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. Peningkatan konsumsi rokok sangat berdampak pada tingginya angka kesakitan dan angka kematian akibat dari zat yang dikandung oleh rokok.**

**Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang**

***(Sumber : Depkes RI Infodatin, 2013).***

---

**Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok diantaranya melalui Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang mengatakan bahwa *“Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”*.**

---

**Amanat Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 tersebut disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia. Provinsi yang Kabupaten atau Kotanya memiliki atau melaksanakan peraturan tentang KTR terbanyak adalah D.I Yogyakarta sebanyak 80% dan Sumatera Barat sebanyak 73,68 %.**

*(Sumber : Depkes RI Pusdatin, 2013)*

Menurut hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masih terlihat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas “X” yang merokok disembarang tempat padahal kenyataannya sudah banyak peringatan dilarang merokok dalam ruangan, tetapi pemanfaatannya belum maksimal.

**Di Kabupaten Indramayu telah disahkan peraturan Bupati No. 1.A.1 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun kebijakan tersebut belum berfungsi dengan baik untuk melindungi masyarakat dari asap rokok. Dinas “X” merupakan lembaga pemerintahan daerah yang seharusnya mendukung kebijakan tersebut.**

Di Dinas “X” terdapat 58,1% pegawai yang merokok di dalam ruangan, sehingga implementasi kebijakan KTR tersebut dikalangan ASN Kabupaten Indramayu masih rendah.

*(Sumber: Data Nominatif ASN Dinas X, 2015).*

# **Tujuan Penelitian**

---

**Menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi Perbup Indramayu No. 1.A.1 tahun 2015 sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi.**

# **Desain Penelitian**

---

**Desain penelitian adalah macam atau jenis penelitian tertentu yang terpilih untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan**

*(Sumber : Saepudin, 2011: 48).*

**Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian Kualitatif dengan rancangan fenomenologi.**

## **B. Informan Penelitian**

---

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang menyusun PERBUP tentang KTR di Indramayu**
- b. Kepala Bidang Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu**
- c. Pemegang Promkes UPTD Puskesmas Margadadi**
- d. Pegawai Badan Lingkungan Hidup kabupaten Indramayu**



---

**Jumlah informan 14 orang, antara lain 11 orang pegawai Dinas X sebagai informan triangulasi dan 3 orang informan utama terdiri dari Sekretariat Daerah (SEKDA) Kab. Indramayu bagian Hukum, Kepala Bidang Promkes Dinas Kesehatan Kab. Indramayu dan pemegang Promosi Kesehatan (Promkes) Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Margadadi**

# HASIL PENELITIAN

No.	KODE IN.	Umur	Perilaku merokok	Pendidikan
1	<b>BJ.1</b>	<b>39</b>	<b>Tidak</b>	<b>S2</b>
2	ID.2	54	Tidak	S2
3	BS.3	37	Tidak	S2
4	IJ.4	47	Tidak	S1
5	BO.5	35	Ya	S1
6	BB.6	46	Ya	SMA
7	<b>BT.7</b>	<b>51</b>	<b>Ya</b>	<b>S1</b>
8	<b>BY.8</b>	<b>48</b>	<b>Tidak</b>	<b>S1</b>
9	IR.9	46	Tidak	DIII
10	IS.10	42	Tidak	SMA
11	IR.11	37	Tidak	SMA
12	BD.12	35	Ya	SMA
13	IY.13	49	Tidak	S1
14	BM.14	39	Ya	S1

# Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

---

## 1. Komunikasi

### a. Latar belakang dibentuknya kebijakan KTR di Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan utama menyatakan bahwa KTR ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak buruk kesehatan terhadap masyarakat akibat adanya asap rokok dan merupakan tuntutan untuk mengikuti peserta UKS tingkat Nasional sehingga harus mempunyai Perbup tentang KTR di Indramayu.

## **b. Sosialisasi**

---

**Beberapa informan menyatakan bahwa sosialisasi KTR dan implementasinya sudah dilakukan, dan penyusunan Perda KTR masih sebatas isu saja.**

**Pada saat dilakukan konfirmasi triangulasi yang dilakukan terhadap 11 Pegawai mengenai penyampaian informasi dan sosialisasi Perbup KTR di Indramayu bahwa sudah mendapatkan sosialisasi tentang KTR.**

## 2. Struktur Birokrasi

### a. Pandangan Pemda terhadap Pelanggar Kebijakan

**Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan bahwa kita tidak bisa melarang orang merokok tapi alangkah baiknya kita menegur agar dia menaati peraturan dengan merokok ditempat yang telah disediakan (BJ.1)**

## **b. Mekanisme Prosedur Pelaksanaan**

---

**Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan utama bahwa mekanisme dalam Perbup ini belum ada karena masih berbentuk Peraturan Bupati kecuali dalam bentuk Peraturan daerah adapun dari informan utama lain bahwa pelaksanaan kebijakan ini bergantung dari masing-masing OPD penanggung jawab.**

### **3. Sumber Daya**

---

**Berdasarkan hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Kebijakan ini SDM yang berperan adalah SKPD terkait seperti Dinkes, dinas pendidikan, dinas agama, rumah sakit, puskesmas, klinik dan masing-masing kepala Dinas lain baik Swasta maupun pemerintah.**

## b. Sumber Dana

---

**Dari hasil wawancara dengan informan utama jumlah dana yang tersedia dalam rangka penetapan KTR ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), donasi dari pengusaha nasional maupun internasional.**



### c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan KTR ini pada dasarnya sangat dibutuhkan, yang tersedia oleh Pemerintah Daerah sendiri antara lain dalam bentuk pengadaan media promosi seperti pemasangan *billboard*, spanduk, *leaflet*, tentang bahaya rokok dan sebagainya selain itu melalui penyuluhan bahaya rokok sudah sering dilakukan oleh pihak terkait .

Berdasarkan wawancara dengan informan utama bahwa menurut Kepala Bidang Promkes Dinkes belum ada media promkes yang efektif untuk menurunkan angka kecanduan merokok.

## **4. Disposisi**

---

**Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengatakan Pengawasan KTR hanya dilakukan oleh penanggung jawab dari masing-masing Dinas dan pengawasan KTR masih kurang efektif, serta harapan untuk kedepannya iklan rokok sepanjang jalan Kota Indramayu bisa dilarang.**

### **a. Harapan Pegawai Dinas X dalam Kebijakan KTR**

---

**Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai bahwa mereka berharap agar peraturan ini dapat menetapkan sanksi yang lebih tegas, dan setiap aturan yang ditetapkan harus diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai khususnya ruang tertutup khusus merokok di tempat kerja.**

b. Peran serta pegawai dalam mengimplementasikan KTR di tempat kerja

---

**Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai disimpulkan sebagian besar mereka sering mengingatkan dan menegur para pelanggar aturan KTR tersebut bahkan untuk perokok merasa malu karena sering ditegur pegawai lain, namun masih ada pegawai yang enggan untuk menegur dengan alasan pribadinya.**

# Implementasi Peraturan Bupati Indramayu No. 1.A.1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

---

Masalah di lapangan terhadap persoalan ini adalah:

- 1. Masih ada pegawai yang bebas merokok di tempat yang telah ditandai sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).**
- 2. Sosialisasi KTR yang disampaikan oleh pihak kepala Dinas X kurang intensif.**
- 3. Kurangnya kesadaran Pegawai tentang larangan merokok di KTR.**
- 4. Kurangnya pengetahuan Pegawai tentang sanksi**
- 5. Tidak tersedianya tempat tertutup khusus perokok di lingkungan Dinas X.**
- 6. Sanksi yang ditetapkan dalam Perbup masih bersifat sanksi ringan**
- 7. Kurang tegasnya pemimpin Dinas X dalam pengelolaan KTR**

# Kesimpulan

---

- 1. Sosialisasi kepada para pegawai mengenai kebijakan KTR sebenarnya sudah dilakukan tetapi masih kurang intensif. Pengetahuan tentang pentingnya KTR tersebut pegawai pun sudah banyak yang mendukung 100% Kebijakan KTR di tempat kerja.**
- 2. Struktur birokrasi Kepala dan Sekretaris Dinas X belum memahami secara keseluruhan isi dari kebijakan KTR**
- 3. Sumber daya kebijakan KTR meliputi SDM dan sumber dana sudah tersedia, SDM yang berperan semua SKPD dan jumlah dana anggaran KTR semua dari APBD dan donasi pihak ketiga meskipun tidak banyak.**
- 4. Disposisi politik yang kurang dimiliki oleh kepala Dinas X sebagai pengelola kebijakan KTR dan Pemda Indramayu. Namun peran serta pegawai non perokok sangat tinggi.**



TERIMAKASIH